

## Abstrak

**Latar Belakang :** Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya KPU bekerja secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Kemudian dalam melaksanakan ketentuan mengenai verifikasi bakal calon dan ketentuan mengenai teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota KPU perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan produk hukum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota. Dalam Peraturannya KPU Nomor 20 Tahun 2018 membuat sebuah ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) yang mengatur pelarangan mantan Terpidana Bandar narkoba, Kekerasan seksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2019, hal tersebut dianggap bersifat diskriminatif karena telah serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang dan juga bertentangan dengan pasal 240 Ayat 1 Huruf (g) Undang-undang Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang sama sekali tidak mengatur mengenai adanya larangan mantan Terpidana Bandar narkoba, Kekerasan seksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. **Tujuan :** Untuk mengetahui bagaimanakah sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. **Metode** : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). **Hasil** : sesuai dengan penelitian yang saya lakukan Pasal 4 Ayata (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sinkron dengan Pasal 240 Ayat 1 Huruf (g) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. **Kesimpulan** : Menjadi anggota Legislatif adalah hak seluruh warga negara yang dijamin oleh konstitusi, bahkan termasuk mantan narapidana sekalipun karenayang disebut dengan mantan narapidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani hukumannya, sehingga setelah selesai status mereka sama dengan warga lainnya dan patut mendapatkan persamaan dibawah kedudukan hukum, dengan menabrak Undang-undang dan membatasi hak warga negara untuk dipilih walaupun, di sisi lain KPU menciptakan hasil proses demokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, tetapi jika dengan cara menjegal seperti itu menurut penilaian saya sangat kurang bijaksana.

Kata Kunci : Sinkronisasi, PKPU No. 20 Tahun 2018, Calon Anggota Legislatif

## Abstract

**Background :** The General Election Commission (KPU) is a national, permanent, and independent election management agency in conducting general elections. The KPU's working area covers the entire territory of the Unitary Republic of Indonesia. In carrying out its duties, the KPU works continuously and in holding elections, the KPU is free from the influence of any party relating to the implementation of its duties and authorities. All aspects related to elections are the responsibility of the KPU and not other institutions. Then in carrying out the provisions regarding verification of prospective candidates and provisions regarding the nomination of DPR, Provincial DPRD and Regency / City DPRD candidates, the KPU needs to stipulate General Election Commission Regulation regarding the nomination of Members of the House of Representatives, Provincial Regional House of Representatives, and Regency Regional House of Representatives /City. Therefore the Election Commission issued a legal product No. 20 of 2018 concerning the Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD, Regency / City DPRD. In its Regulation KPU Number 20 Year 2018 makes a provision in article 4 paragraph (3) which regulates the prohibition of ex-drug convicts, sexual violence against children and corruption to become candidates for DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD in 2019 elections, it is considered discriminatory because it has immediately punished and restricted a person's rights and also contradicts article 240 Paragraph 1 Letter (g) of the Election Law Number 7 of 2017 concerning general elections which does not regulate the prohibition of ex-convicted drug dealers. , Sexual violence against children and corruption to become Candidates for members of the DPR, Provincial DPRD, Regency / City DPRD. **Purpose :** To find out how to synchronize the Election Commission Regulation Number 20 of 2018 Regarding the Nomination of Members of DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD with Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. **Method :** In this study,

researchers used a statutory approach. **Result :** in accordance with the research that I did Article 4 Ayata (3) Election Commission Regulation Number 20 of 2018 Regarding the Nominations of Members of the DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD not in sync with Article 240 Paragraph 1 Letter (g) of Law Number 7 Year 2017 About General Elections. **Conclusion :** Being a member of the Legislature is the right of all citizens guaranteed by the constitution, even including ex-convicts even though the so-called ex-convict is someone who has finished serving his sentence, so that after completing their status they are equal to other citizens and deserve equality under the legal position, by crashing The law and limits the rights of citizens to be elected though, on the other hand the KPU creates the results of a clean democratic process, free from corruption, but if it is done in such a way in my judgment it is very unwise.

Keyword : Synchronizing, PKPU No. 20 of 2018, Candidates for Legislative Members

